

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan suatu proses dalam meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dilaksanakan melalui program jangka panjang yang dilaksanakan secara terarah dan bertahap (Sukirno, 1995:13).

Dalam usaha meningkatkan pembangunan saat ini, peranan daerah sangat diperlukan sebagai bagian dalam konteks pembangunan nasional. Peranan dan kemampuan melaksanakan pembangunan di daerah harus terus diupayakan untuk lebih meningkat selaras dengan pembangunan nasional. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi atau lapangan usaha di suatu daerah dalam suatu periode tertentu (Nota Keuangan, 1999:447).

Para ahli ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk (Sukirno, 1995:14). Dari pengertian ini dapat diketahui, bahwa PDRB merupakan cerminan keberhasilan daerah tersebut dalam menjalankan pembangunan ekonomi atau merupakan salah satu ukuran yang dijadikan dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB daerah tersebut berarti semakin maju daerah tersebut dan sejahtera pula daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah juga harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, faktor organisasi, dan faktor manajemen, tetapi yang sering digunakan dalam tolak ukur pembangunan ekonomi daerah adalah kemampuan keuangan, yaitu dengan melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Sukirno, 1995:14).

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah otonom, juga harus terus mengupayakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun perkembangan PDRB di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Sleman Tahun Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB	Pertumbuhan (%)
2000	3.985.175	-
2001	4.171.291	4,67
2002	4.374.037	4,86
2003	4.596.293	5,08
2004	4.837.435	5,25

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2000 – 2004, BPS.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman selama tahun 2000 sampai dengan 2004 selalu mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 3.985.175 juta pada tahun 2000 menjadi sebesar Rp. 4.837.435 juta pada tahun 2004. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan dari 4,67% pada tahun 2001 menjadi 5,25% pada tahun 2004. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman selama tahun 2000 – 2004 mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diinginkan, maka dibutuhkan kemampuan keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah guna terciptanya kemandirian dan pertumbuhan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah ini dapat berupa pendapatan asli daerah, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Yulianti,2000:14). Kemampuan keuangan daerah secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, untuk mempercepat tercapainya kemandirian daerah di bidang pendanaan, dalam arti mampu membiayai, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah harus meningkatkan keuangan daerah dengan menggali pendapatan asli daerah yang sesuai dengan keadaan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Kemampuan memanfaatkan potensi daerah yang ada merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang sangat penting bagi kepentingan daerah dan masyarakat (Kartasmita, 1996:354). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus meningkatkan keuangan daerahnya agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Setiap daerah harus jeli dalam melihat dan mengolah potensi yang dimilikinya sehingga mampu menghasilkan untuk pembiayaan belanja daerah termasuk membiayai pembangunan di daerahnya. Dengan semakin meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka peranan keuangan daerah akan semakin penting karena daerah dituntut dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri, di samping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara lebih efisien. Sesuai dengan hal itu daerah dituntut untuk meningkatkan kesiapan aparatur-aparatur daerah dalam menghadapi masalah pembangunan yang lebih kompleks lagi (Yulianti, 2000:15).

Selain memiliki kewenangan dalam mengelola dan menggunakan keuangan sendiri, pemerintah daerah juga memerlukan pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Perkembangan PAD di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sleman Tahun 2000 – 2004
(Ribuan Rupiah)

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
2000	17.889.885	–
2001	29.571.153	65,30
2002	38.908.193	31,57
2003	52.978.731	36,16
2004	78.238.532	47,68

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2000 – 2004, BPS.

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa bahwa PAD Kabupaten Sleman selama tahun 2000 sampai dengan 2004 selalu mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 17.889.885 ribu pada tahun 2000 menjadi sebesar Rp. 78.238.532 ribu pada tahun 2004. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Sleman dalam mengelola sumber dananya sendiri selama tahun 2000 – 2004 mengalami perkembangan yang meningkat.

Selain faktor PAD, faktor lain yang juga mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto daerah adalah angka kerja (AK). AK dapat dilihat dari penduduk usia kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan, di mana angkatan kerja ini merupakan input yang mengelola aktivitas produksi (Yuliati, 2000: 18). Semua itu bertujuan untuk memajukan perekonomian suatu daerah yang tercermin lewat PDRB. Adapun perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3.
Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Sleman
Tahun 2000 – 2004

Tahun	Angkatan Kerja (Orang)	Pertumbuhan (%)
2000	490.080	3,57
2001	499.830	1,99
2002	514.004	2,84
2003	519.000	0,97
2004	521.432	0,47

Sumber: Kabupaten Sleman Dalam Angka, 2000 – 2004, BPS.

Dari uraian di atas pemerintah daerah diharuskan meningkatkan keuangan daerah guna membiayai pembangunan di daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus

terus berusaha dan berupaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi daerah dan sumber-sumber yang telah dimanfaatkan selama ini dan menggali sumber-sumber yang baru. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui APBD yang dikelola secara efektif dan efisien.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.
2. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah angkatan kerja secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman tahun 1981-2004.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah angkatan kerja secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparatur pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, masukan dan evaluasi agar dapat lebih memantapkan peran perencanaan daerah di masa yang akan datang.
2. Bagi pihak lain adalah sebagai bahan bacaan dan perbandingan untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat dan membutuhkan.

1.5. Studi Terkait

Menurut Yuliati (2000) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menyongsong Otonomi Daerah (studi kasus Kabupaten Sleman, DIY)” menyatakan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman menjelang diberlakukannya otonomi daerah menunjukkan kecendrungan meningkat dilihat dari indikator rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) dan kemampuan PAD di dalam membiayai

pengeluaran rutinnya. Akan tetapi dilihat dari rasio bantuan dan subsidi terhadap TPD makin besar ketergantungan daerah terhadap pusat, sedangkan kemampuan PAD di dalam membiayai pengeluaran pembangunannya relatif tetap. Setelah melaksanakan otonomi sebagai daerah uji coba kemampuan PAD di dalam membiayai pengeluaran rutinnya tetap meningkat. Variabel jumlah angkatan kerja, PAD, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi daerah dengan $\alpha = 1\%$.

Model Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_r = f(AK, PAD_r, PR_r, PPr).$$

Di mana Y_r adalah Produk Domestik regional Bruto, AK adalah jumlah angkatan kerja, PAD_r adalah Pendapatan Asli Daerah riil, PR_r adalah Pengeluaran Rutin riil dan PPr adalah pengeluaran Pembangunan riil. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan periode waktu 1981 – 1999, yang kemudian dilakukan estimasi dengan metode *Ordinary least Square (OLS)*.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa variabel jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Produk Domestik Regional Bruto daerah, hal ini bermakna bahwa angkatan kerja adalah sumber daya manusia yang produktif menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel PAD riil mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini bermakna bahwa

komponen PAD yang didominasi oleh pajak dan retribusi daerah berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah. Variabel pengeluaran pembangunan riil juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, hal ini bermakna bahwa pengeluaran pembangunan ini umumnya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang dapat memberikan nilai tambah produksi. Variabel pengeluaran rutin yang tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah, bermakna bahwa sebagian besar pengeluaran rutin yang dikeluarkan adalah untuk gaji pegawai yang dimungkinkan para pegawai pemda Kabupaten Sleman akan membelanjakannya keluar daerah Kabupaten Sleman.

Setiati (1996) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Variabel Demografi dalam Model Pertumbuhan Ekonomi: Kasus 25 Propinsi di Indonesia, 1983 – 1992”, menyatakan bahwa beberapa faktor yang diduga mempengaruhi proses pertumbuhan adalah akumulasi stok modal, tenaga kerja, mutu modal manusia, dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan bisa negatif maupun positif tergantung pada efisiensi tindakan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasanya. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk semua daerah adalah positif dan nyata. Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDRB untuk semua daerah adalah positif. Mutu modal manusia bisa berpengaruh positif maupun negatif tergantung kualitas pendidikan dan juga perbedaan perkembangan sektor-sektor ekonomi di tiap daerah.

Tjiptoherjanto (1995) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Pembangunan Daerah”, menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan pilihan yang tepat, melihat kenyataan bahwa jumlah penduduk khususnya angkatan kerja merupakan asset bagi pembangunan guna mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Salah satu indikator untuk memantau perkembangan sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditawarkan.

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diajukan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.
2. Jumlah angkatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.
3. Pendapatan asli daerah dan Jumlah angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman tahun 1981 – 2004.

1.7. Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka beberapa variabel yang dibahas dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh produk atau nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan semua lapangan usaha atau sektor di

daerah dalam jangka waktu satu tahun. Data yang digunakan adalah data tahunan dengan satuan rupiah, berdasarkan harga konstan 2000. PDRB dapat dihitung sebagai berikut (Dumairy, 1997:38):

$$PDRB_{riil} = \frac{PDRB_{nominal}}{P}$$

di mana:

$PDRB_{riil}$ = Produk Domestik Regional Bruto riil

$PDRB_{nominal}$ = Produk Domestik Regional Bruto nominal

P = Indeks harga

Agar data dapat digunakan dalam sebuah model regresi, maka data nilai menurut harga yang berlaku (nominal) harus diubah menjadi data nilai riil menurut harga konstan tahun tertentu. Tahun dasar yang dipilih dan digunakan dalam studi ini adalah tahun 2000. Dengan memakai tahun dasar 2000 berarti indeks harga tahun 2000 = 100. Selanjutnya dibuat Angka Indeks (AI) berdasarkan data indeks harga konsumen di Kabupaten Sleman. Untuk mengubah nilai menurut harga berlaku (nominal) menjadi nilai riil berdasarkan harga konstan tahun 2000 yaitu dengan cara sebagai berikut (Sukirno, 1995:56):

$$NR_i = (NB_i / IH_i) \times 100$$

di mana:

NR_i: Nilai riil tahun i

NB_i: Nilai berlaku (nominal) tahun i

IH_i: Indeks harga (2000 = 100) tahun i.

Setelah data diriilkan maka data baru dapat dipergunakan dalam regresi.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang secara terpisah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang dihitung berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2000.

3. Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, di mana angkatan kerja ini merupakan input yang mengelola aktivitas produksi.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu yang diperoleh dari sumber Biro Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya. Semua data yang diambil adalah data runtun waktu tahunan mulai dari tahun 1981 – 2004. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi PDRB, pendapatan asli daerah (PAD) dan jumlah angkatan kerja.

1.8.2. Model Analisis

Dalam penelitian ini ada dua macam model yang digunakan. Model tersebut terdiri dari model teoritis dan model yang ditaksir.

1.8.2.1. Model Teoritis

Untuk kepentingan analisis dan interpretasi data serta membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, dipergunakan model analisis sebagai berikut:

$$Y_r = f(\text{PAD}, \text{AK}) \dots \dots \dots (1)$$

$$f_{\text{PAD}} > 0; f_{\text{AK}} > 0$$

di mana:

Y_r = Produk Domestik Regional Bruto riil (jutaan Rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah riil (jutaan Rupiah).

AK = Jumlah angkatan kerja (orang)

1.8.2.2. Model Yang Ditaksir

Dari model teoritis di atas (persamaan 1) akan dikemukakan model yang ditaksir sebagai berikut:

1. Model Linear

$$Y_r = \alpha_0 + \alpha_1 \text{PAD} + \alpha_2 \text{AK} + e \dots \dots \dots (2)$$

2. Model Log Linear

$$\ln Y_r = \ln b_0 + b_1 \ln \text{PAD} + b_2 \ln \text{AK} + u \dots \dots \dots (3)$$

di mana:

Y_r = PDRB riil (jutaan rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah riil (dalam jutaan rupiah)

AK = Jumlah angkatan kerja (orang)

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, b_0, b_1, b_2, b_3$ = Parameter yang diestimasi

e dan u = Variabel gangguan

Ln = Log natural.

Dari model persamaan (2) dan (3) di atas kemudian dilakukan uji MWD (MacKinnon, White, Davidson) untuk mengetahui apakah persamaan (1) tersebut lebih tepat berbentuk regresi linear atau regresi non linear. Uji MWD dilakukan dengan asumsi (Gujarati, 1995:265):

H_0 : Model linear (Y adalah fungsi linear dari X)

H_a : Model log linear (LN Y adalah fungsi linear dari LN X).

Di mana Y merupakan variabel dependen dan X merupakan variabel independen.

Langkah-langkah uji MWD adalah sebagai berikut:

1. Estimasi model dalam bentuk linear untuk mendapatkan nilai estimasi Y (hasilnya Y_f).

$$Y_r = \alpha_0 + \alpha_1 PAD + \alpha_2 AK + e \dots \dots \dots (4)$$

2. Estimasi model dalam bentuk log-linear untuk mendapatkan nilai estimasi LnY_r (hasilnya $Ln f$).

$$LnY_r = Ln b_0 + b_1 LnPAD + b_2 LnAK + u \dots \dots \dots (5)$$

3. Mendapatkan nilai Z_1 ($Z_1 = Ln Y_f - Ln f$).

4. Melakukan regresi variabel Y dengan variabel X dan Z_1 yang dihasilkan dari langkah ketiga. Apabila koefisien Z_1 signifikan dengan uji t, maka H_0 ditolak.

$$Y_r = \alpha_0 + \alpha_1 \text{PAD} + \alpha_2 \text{AK} + Z_1 + e \dots \dots \dots (6)$$

5. Mendapat nilai Z_2 ($Z_2 = \text{antilog Ln-Yf}$).
6. Melakukan regresi log Y dengan variabel log X dan Z_2 . Apabila koefisien Z_2 signifikan dengan uji t, maka H_1 ditolak.

$$\text{LnY}_r = \text{Ln } b_0 + b_1 \text{LnPAD} + b_2 \text{LnAK} + Z_2 + u \dots \dots \dots (7)$$

Setelah di tentukan persamaan model yang digunakan (linear/non linear) berdasar uji MWD di atas, kemudian baru dilakukan olah data dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil biasa (*OrdinaryLeast Square/OLS*).

Apabila nilai koefisien Z_1 signifikan dan nilai koefisien Z_2 tidak signifikan berdasarkan uji t, maka model tersebut bukan model linier. Apabila nilai koefisien Z_1 tidak signifikan dan nilai koefisien Z_2 signifikan berdasarkan uji t, maka model tersebut bukan model transformasi logaritma linier. Apabila nilai koefisien Z_1 dan Z_2 keduanya signifikan atau tidak signifikan berdasarkan uji t, maka kedua persamaan tersebut bisa dipakai tetapi dilihat yang terbaik dengan melihat signifikansi uji t dan uji F atau R^2 nya.

1.8.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian dengan kriteria ini membantu dalam menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti: ketidakterbiasan (*unbiased*), konsistensi (*consistency*) dan kecukupan (*sufficiency*). Jika asumsi-asumsi teknik ekonometri yang diterapkan untuk menaksir parameter tidak dipenuhi, maka taksiran-taksiran tersebut dianggap tidak memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan.

Pengujian ini juga disebut dengan pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik, yaitu meliputi pengujian autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

1.8.3.1. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian pengamatan yang tersusun menurut waktu atau ruang. Autokorelasi menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel-variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan pengganggu suatu periode berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya.

Alat uji yang digunakan adalah *Durbin Watson*, untuk mengujinya terlebih dahulu ditentukan nilai kritis d_L (batas lebih rendah) dan d_U (batas lebih tinggi) berdasarkan jumlah observasi dan banyaknya variabel independen (Gujarati, 1993:169). Hipotesis yang digunakan dalam uji Durbin Watson ini adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi (baik positif maupun negatif)

H_a : Ada autokorelasi (baik positif maupun negatif)

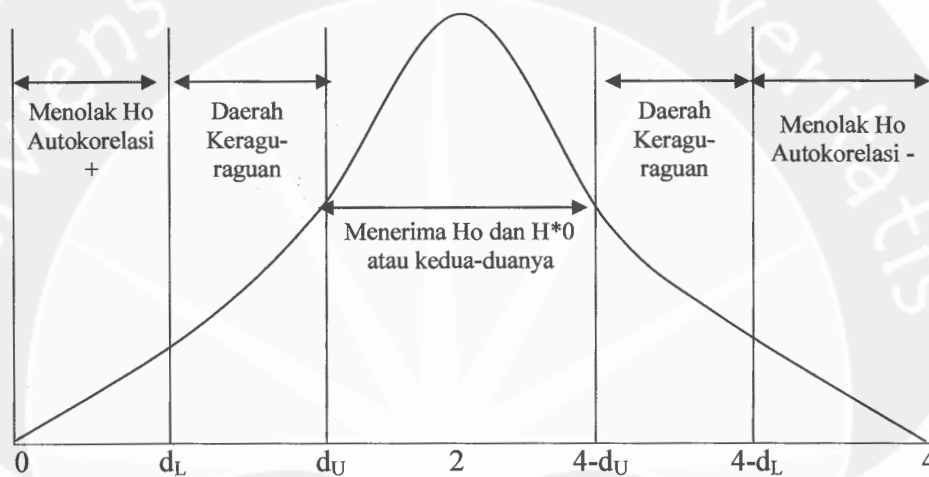
Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. $d < d_L$: tolak H_0 (ada korelasi positif)
2. $d > (4 - d_L)$: tolak H_0 (ada korelasi negatif)
3. $d_U < d < (4 - d_L)$: tidak tolak H_0 (tidak ada korelasi)
4. $d_L \leq d \leq d_U$: pengujian tidak bisa disimpulkan (*inconclusive*)
5. $(4 - d_U) \leq d \leq (4 - d_L)$: pengujian tidak bisa disimpulkan (*inconclusive*).

Secara spesifik untuk uji *Durbin Watson* adalah (Gujarati, 1998:378):

1. Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka H_0 ditolak yang berarti ada autokorelasi.

2. Jika $d_L \leq d \leq d_U$ dan $(4 - d_U) \leq d \leq (4 - d_L)$, maka uji *Durbin Watson* tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, sehingga untuk nilai-nilai ini tidak dapat (pada suatu tingkat signifikan tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor gangguan.
3. Jika d terletak antara d_U dan $(4 - d_U)$ maka H_0 tidak ditolak yang berarti tidak ada autokorelasi.



Gambar 1.1.
Uji *Durbin - Watson* dua sisi

1.8.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Kasus heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai *varian* yang sama untuk semua observasi. Salah satu asumsi pokok dalam regresi klasik adalah bahwa *varian* setiap variabel *error* adalah sama untuk seluruh nilai-nilai variabel independen. Penyimpangan dari asumsi ini adalah apabila seluruh variabel *error* tidak mempunyai *varian* yang konstan, akibatnya

maka penaksiran dan koefisien regresi yang dihasilkan menjadi tidak efisien, disamping itu *varian* dari koefisien menjadi salah.

Gejala heteroskedastisitas ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Park*, dengan urutan langkah sebagai berikut (Gujarati, 1988:329):

1. Menaksir atau mengestimasi model dasar untuk mendapatkan nilai residual.
2. Menaksir persamaan berikut:

$$\text{Ln}\varepsilon^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}X_1 + \mu \dots \dots \dots (8)$$

3. Melakukan pengujian dengan uji t untuk mengetahui apakah koefisien α tersebut secara statistik signifikan atau tidak yaitu dengan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$$H_0 : \alpha = 0$$

$$H_a : \alpha \neq 0$$

Apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H_0 ditolak, yang berarti secara statistik koefisien α signifikan. Dengan demikian dalam model regresi mengandung gejala heteroskedastisitas. Apabila t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel maka H_0 tidak ditolak, yang berarti secara statistik koefisien α tidak signifikan. Dengan demikian dalam model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

1.8.3.3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk melihat hubungan di antara variabel independen dalam model dapat dilakukan uji F yang menghasilkan kesimpulan ada atau tidak ada hubungan yang signifikan diantara

variabel independen tersebut dengan metode *auxiliary regression*. Kemudian nilai F dari *auxiliary regression* tersebut dibandingkan dengan F-tabel (Gujarati, 1988:300). Rumus untuk mencari F-hitung adalah:

$$F_i = \frac{R^2_{x_i \cdot x_2 x_3 x_4 \dots x_k} / (k - 2)}{1 - R^2_{x_i \cdot x_2 x_3 x_4 \dots x_k} / (n - k + 1)}$$

di mana:

$R^2_{x_i \cdot x_2 x_3 x_4 \dots x_k}$ adalah koefisien determinasi dari regresi

$$X_i = \beta_0 + \beta_1 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + e_i \dots \dots \dots (9)$$

k adalah jumlah variabel bebas termasuk konstanta

n adalah jumlah data.

Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka hal ini berarti bahwa variabel bebas X_i tertentu mempunyai korelasi dengan variabel-variabel bebas yang lain dengan demikian terjadi multikolinearitas. Apabila F-hitung lebih kecil dari pada F-tabel maka hal ini berarti bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas X_i dengan variabel-variabel bebas lainnya, dengan demikian tidak ada multikolinearitas.

1.8.4. Uji Statistik

1.8.4.1. Uji t (Pengujian Secara Individual)

Uji t adalah uji yang dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara

individual. Hipotesis yang digunakan adalah dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

Rumus untuk mencari t-hitung adalah (Gujarati, 1998:109):

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_i}{Se(\hat{\beta}_i)}$$

di mana:

$\hat{\beta}_i$ = Koefisien regresi variabel independen

$Se(\hat{\beta}_i)$ = Standar *error* koefisien regresi

i = 1,2,3,....

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada tingkat kepercayaan tertentu. Dari hasil tersebut dapat ditentukan metode pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 tidak ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1.8.4.2. Uji F (Pengujian Secara Serentak)

Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari variabel-variabel independen secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq 0$$

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada tingkat kepercayaan tertentu. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Apabila F-hitung lebih kecil dari pada F-tabel, maka H_0 tidak ditolak artinya variabel dependen secara keseluruhan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Nilai F- hitung diperoleh dengan rumus (Gujarati, 1995:249):

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

di mana:

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : Banyaknya observasi.

1.8.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk menghitung seberapa besar variasi perubahan dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel

independen. Nilai R^2 paling besar adalah 1 dan paling kecil adalah 0 ($0 < R^2 < 1$). Bila $R^2 = 0$, maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab variabel independen yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, kontribusinya terhadap variasi perubahan variabel adalah 0. Semakin dekat nilai R^2 dengan 1, maka makin tepat garis regresi untuk meramalkan variabel dependen dan hal ini menunjukkan hasil estimasi keadaan sebenarnya (Sugianto, 1995:54).



1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang meliputi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori dan penelitian sebelumnya

BAB III. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum memuat uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Sleman.

BAB IV. ANALISIS HASIL

Analisis hasil menguraikan proses pengolahan data-data yang berhasil ditentukan dan hasil analisis serta arti ekonominya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini sekaligus saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak lain yang terkait.